



Meleset saat Lebaran, Berharap di Jumat Agung dan Paskah

JOGJA - Libur Nasional Jumat Agung dan Paskah tahun ini menjadi udara segar bagi pelaku usaha hotel di DIJ. Pasalnya okupansi hotel saat libur Lebaran tak bisa mencapai target yang telah ditentukan.

"Alhamdulillah dua hari Jumat-Sabtu ini berkah bagi kami," ujar Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIJ Deddy Pranowo Eryono saat dikonfirmasi, Rabu (16/4).

Selama dua hari tersebut, pihaknya telah mencatat rata-rata okupansi hotel di seluruh DIJ sebesar 55 persen. Libur nasional untuk memperngati Jumat Agung dan Paskah dinilai menjadi faktor naiknya okupansi tersebut. "Ini masih ada potensi naik lagi," tuturnya.

Libur Lebaran tahun ini, capaian okupansi hotel di DIJ jauh dari target yang ditentukan yakni sekitar 50-60 persen. Padahal target yang diharapkan bisa mencapai 80 persen.

Deddy mencontohkan, kondisi tersebut juga terjadi pada musim libur Lebaran beberapa waktu lalu. Selama periode

tanggal 30 Maret hingga 7 April 2025 okupansi hotel di DIJ hanya menyentuh 62,8 persen.

Diakui, merosotnya okupansi hotel memang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Misalnya di Solo yang tingkat huniannya hanya menyentuh 55,8 persen. Lalu juga di Jawa Timur yang berada di kisaran 60 persen.

"Kondisi (okupansi) di DIJ memang lebih unggul, tetapi tidak bisa mengimbangi operasional," ujar Deddy.

Salah satu faktor menurunnya okupansi di antaranya banyak wisatawan menginap di penginapan yang relatif lebih murah. "Mungkin kos harian, *homestay* itu malah ramai kemarin. Yang murah bagi tamu karena tidak kena pajak dan izin-izin," terangnya.

Namun ia mengatakan dengan kondisi seperti itu, hingga saat ini pihaknya masih bisa menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) para karyawan hotel. Mereka saat ini tidak bisa hanya mengandalkan kerjasama dengan



GUNTING AGA TERTAKALIBAR JOGJA

pemerintah. "Belum ada kerjasama spesifik. Pemprov DIJ juga bingung," jelasnya.

Para pelaku usaha hotel dan restoran tetap melakukan promosi secara mandiri dengan agenda *table top guyub sesarengan* dalam waktu dekat ini. Adanya efisiensi anggaran menjadi dasar mereka tidak hanya mengandalkan kerja sama dengan pemerintah. "Sementara kami butuh hidup maka mandiri kami berupaya," tandasnya.

Mereka juga meminta Pemkot Jogja bisa memberikan keringanan atau relaksasi pajak. Itu menyusul kurang maksimalnya pendapatan perhotelan dalam beberapa waktu terakhir ini. Bahkan, dia mengibaratkan bisnis perhotelan kini tengah memasuki masa kegelapan karena merosotnya tingkat hunian.

Deddy pun berharap agar pemerintah bisa memberikan keringanan pada pengusaha

Hotel di Kota Jogja. Misalnya dengan melakukan relaksasi pajak hingga keringanan pembayaran listrik dan air PDAM.

Jika berbagai upaya tersebut bisa diwujudkan, tentu sangat berdampak positif terhadap operasional hotel. Lantaran saat ini para pengusaha hotel juga terpaksa harus melakukan pengurangan jam kerja karyawan hingga tidak memperpanjang kontrak karyawan. "Kami akan melihat bagaimana oku-

ATRAKSI WISATA: Warga mengenakan topeng menari bersama dalam Festival Jeron Beteng 2025, di Alun-Alun Selatan, Kota Jogja, (12/4). PHRI DIJ berharap kunjungan wisata meningkat saat long weekend.

pansi bulan depan. Jika masih sulit bertahan, ancamannya hanya PHK," tegasnya.

Terkait dengan permasalahan tersebut, Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengakui, masa tinggal wisatawan atau *length of stay* wisatawan di Kota Jogja memang tergolong rendah. Angkanya belum mampu menyentuh dua hari.

Dia pun tengah menyusun metode agar lama tinggal wisatawan bisa lebih lama. Salah satu yang sudah direncanakan adalah dengan menjalin kerjasama dengan negara lain. Misalnya, melalui program

bule mengajar yang dapat menahan wisatawan mancanegara untuk bisa tinggal di Kota Jogja. Minimal dalam waktu seminggu atau beberapa hari.

Sementara soal relaksasi pajak, Bupati Kulon Progo periode 2011-2019 itu meminta agar pengusaha hotel bisa mengajukan permohonan. Sehingga nantinya Pemkot bisa memiliki dasar untuk memberi keringanan. "Setiap permohonan akan dikaji satu

persatu, guna diberikan solusi yang tepat," tegas Hasto.

Kepala Dinas Pariwisata DIJ Imam Pratnadi membenarkan banyak wisatawan saat libur Lebaran memilih menginap di penginapan yang relatif lebih murah. Menurutnya, kemampuan ekonomi warga Indonesia relatif menurun. "Mulai dari 150 ribuan satu kamar, itu ternyata penuh dan menjadi pilihan," ujarnya.

Melihat hal itu, ia mempunyai wacana agar kos dan penginapan kecil dapat diatur dalam pengaturan khusus terkait izin dan sebagainya. Kewenangan tersebut berada di kabupaten/kota. "Supaya bisa memberikan dampak terkait perpajakan di kabupaten/kota," tuturnya.

Menurutnya, rhenurrunnya okupansi hotel saat Lebaran kemarin karena mayoritas orang yang berkunjung ke DIJ merupakan pemudik. Mereka cenderung akan menginap di rumah-rumah keluarga atau orang tua dan memilih yang lebih murah karena tujuannya bukan berlibur. (*inu/oso/hep*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005